

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2014.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Burhanudin A. Tayibnapi, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979

Feisal Tamrin, *Reformasi Birokrasi, Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Jakarta: Blantika, 2004.

Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Huda, N., *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Moh.Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1982.

Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Jakarta* : Ghalia Indonesia,1982.

Ridwan, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Ridwan.HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali, 1986

Sedarmayanti, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm 71

Soemantri, S., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2006.

Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT Inti Iday Press, 1927.

Sondang P Siagian, *Filsafat administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1996

Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka yang ada di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

JURNAL

A.Rahmawati, Kajian Kinerja ASN Pria dan ASN Wanita Pada RSUD Haji Makassar, *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen dan Akuntansi)*, 2016.

Raffles, J., Mekanisme Pengisian dan Penempatan dan Stopping dalam Posisi di Pemerintah Daerah Kota Solok, *Unes Law Review*, Vol 2(1), 2019.

Sudrajat, T, Eksistensi Kebijakan Pengisian Jabatan Struktural dalam Kerangka Pengembangan SDM Aparatur Berbasis MERIT, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol 8 (1), 2014.

C.ARTIKEL

<http://bkd.cilacapkab.go.id/p/52/tata-cara-pengisian--jabatan-pimpinan-tinggi-di-lingkungan-instansi-pemerintah>, Diakses 15 Maret 2020

<http://eprints.untirta.ac.id/1337/1/07.pdf>, Diakses 19 Desember 2020

<https://covesia.com/archipelago/baca/84700/gambaran-dan-sejarah-kota-padang>.

[Diakses 17 September 2020.](#)

<https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-manajemen-secara-lengkap/>, Diakses 12

Maret 2020

<https://www.pengadaan.web.id/2019/03/lelang-jabatan.html>, Diakses 19 Desember 2020

<Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Lembaga>, Diakses 5 Februari 2020